

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN MANGROVE (Studi Tentang Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo)

Dian Kurnia Pribadiningtyas, Abdullah Said, Mochamad Rozikin

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Email : dianntyaz@gmail.com

***Abstract:** Society Participation Towards the Rehabilitation of Mangrove (Study about Government Roles to Improving the Society Participation for Mangrove Forest Rehabilitation in Environmental Agent at Probolinggo City). Mangrove forests in Probolinggo City are increasingly degraded and damaged because of the construction and activities of the local community. The Government of Probolinggo through the Environmental Agent rehabilitates the mangrove forest based on the society participation. The focus of this research are 1) to know the role of Probolinggo Government in improving society participation in conserving mangrove forests, 2) to know the results achieved in the implementation of efforts to preserve mangrove forests 3) to know the supporters and restricting factors in increasing the participation of the community in the rehabilitation of mangrove forests. The results of this research were to increase community participation through some strategies that build community participation, do nursery and infrastructure development. BLH Probolinggo had acted properly by running its role as a modernists, regulator, catalysts, stabilizers, dinamisator and as a pioneer. The results obtained in the implementation of rehabilitation were the positive impacts for the participation of the community, the livelihood of fishermen and the conservation of mangrove forests.*

Keywords: society participation, rehabilitation of mangrove forests, environmental degradation.

Abstrak: Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove (Studi tentang Peran Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo). Hutan mangrove di Kota Probolinggo semakin terdegradasi dan mengalami kerusakan akibat pembangunan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo melalui BLH melakukan rehabilitasi hutan mangrove dengan berbasis partisipasi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah 1) Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk rehabilitasi hutan mangrove, 2) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan upaya-upaya melestarikan hutan mangrove 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove. Hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui beberapa strategi yaitu membangun partisipasi masyarakat, melakukan pembibitan, dan membangun infrastruktur. Kota Probolinggo sudah berperan dengan baik yakni dengan menjalankan perannya sebagai modernisator, regulator, katalisator, stabilisator, dinamisator dan sebagai pelopor. Hasil dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah dampak positif bagi partisipasi masyarakat, penghasilan nelayan dan kelestarian hutan mangrove.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, rehabilitasi hutan mangrove, kerusakan lingkungan.

Pendahuluan

Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan pasal ini maka kehidupan suatu

negara tidak bisa terlepas dari pembangunan.

Namun, akhir-akhir ini lingkungan menjadi isu yang banyak dibicarakan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan yang dapat membahayakan eksistensi lingkungan itu sendiri, terutama aktivitas dalam hal

pembangunan. Salah satu kerusakan lingkungan yang paling banyak terjadi adalah kerusakan pada hutan mangrove.

Seperti yang diungkapkan oleh Alikodra (1995, dikutip dari Tambunan, Harahap dan Lubis, 2005, h. 56), sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang tergolong unik dan rawan. Keunikan dan khas hutan mangrove disebabkan oleh posisinya sebagai ekosistem peralihan, antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi ini menyebabkan ekosistem mangrove sangat rawan terhadap pengaruh luar, terutama karena spesies biota pada hutan mangrove ini memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar

Menurut Twientananta (2011) Kota Probolinggo gencar melakukan pembangunan seperti pembangunan pabrik dan pemukiman penduduk. Kota Probolinggo merupakan daerah pesisir dengan tingkat kerusakan mangrove yang cukup parah. Dengan luas hutan mangrove yang diperkirakan sekitar 585 hektar dengan laju kerusakan sebesar empat persen per tahunnya.

Luas Hutan Mangrove di Kota Probolinggo Tahun 2010

| No | Lokasi | Luas (Ha) |
|-------|------------------|-----------|
| 1. | Kel. Ketapang | 60 |
| 2. | Kel. Mangunharjo | 34 |
| 3. | Kel. Mayangan | 12,30 |
| 4. | Kel. Pilang | 15 |
| 5. | Kel. Sukabumi | 25 |
| Total | | 146,3 |

Sumber : BLH Kota Probolinggo Tahun 2010

Luas Hutan Mangrove di Kota Probolinggo Tahun 2011

| No | Lokasi | Luas Lokasi (Ha) | Presentase Tutupan (%) |
|-------|-------------|------------------|------------------------|
| 1. | Ketapang | 30 | 16.0 |
| 2. | Pilang | 15 | 125.3 |
| 3. | Sukabumi | 12,5 | 73.1 |
| 4. | Mangunharjo | 63 | 36.1 |
| 5. | Mayangan | 5 | 84.8 |
| Total | | 125,5 | |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (2010) dan Dinas Pertanian (2011). Apabila dilihat luas hutan mangrove dari tahun 2010 dan 2011, luas hutan mangrove di Kota Probolinggo mengalami penurunan dari angka 146,3 Ha pada tahun 2010 menjadi 125,5 Ha pada tahun 2011. Begitupula yang terjadi pada luas hutan mangrove di setiap kawasan. Di kawasan Ketapang pada tahun 2010 memiliki luas 60 Ha sedangkan pada tahun 2011 menjadi 30 Ha sehingga terjadi penurunan 30 Ha. Di kawasan Pilang pada tahun 2010 dan 2011 memiliki luas tetap seluas 15 Ha. Di kawasan Sukabumi pada tahun 2010 memiliki luas hutan mangrove sebesar 25 Ha dan mengalami penurunan hingga angka 12,5 Ha. Di kawasan Mangunharjo pada tahun 2010 memiliki hutan mangrove seluas 34 Ha dan pada tahun 2011 menjadi 63 Ha, sedangkan pada Kelurahan Mayangan tahun 2010 memiliki luas 25 Ha menjadi 5 Ha pada tahun 2011.

Penurunan luas hutan mangrove ini, selain disebabkan oleh aktivitas pembangunan seperti banyaknya industri dan pemukiman yang dibangun di daerah pesisir, tentunya kerusakan hutan mangrove yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas masyarakat pesisir kota Probolinggo. Kebiasaan nelayan dan aktivitas masyarakat pesisir juga turut andil dalam kerusakan hutan mangrove seperti memancing udang dengan alat sundu, kegiatan mencari kepiting dan cacing serta mencari tiram di sekitar hutan mangrove, mendaratkan perahu-perahu di sekitar tanaman mangrove dan limbah rumah tangga.

Fenomena kerusakan hutan mangrove ini tentu akan membawa dampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat pesisir di sekitar pantai Kota Probolinggo. Upaya-upaya melestarikan hutan mangrove juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu dengan penyusunan dan penegakan hukum melalui Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung. Juga dengan melakukan rehabilitasi atau penanaman kembali hutan mangrove melalui program yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo membuat program-program rehabilitasi untuk dilaksanakan bersama dengan masyarakat serta sebagai pengontrol mengenai jalannya pelaksanaan-pelaksanaan program tersebut.

Dari penjabaran tersebut maka perlu partisipasi masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan mangrove yang lebih parah. Partisipasi tersebut khususnya bagi masyarakat yang bermukim di daerah pesisir yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan mangrove. Dikarenakan kerusakan hutan mangrove sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas masyarakat pesisir. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga mempunyai program-program untuk mengatasi fenomena kerusakan hutan mangrove tersebut. Tentunya dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mensukseskan program tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Partisipasi Masyarakat

Seperti yang diungkapkan Alastaire (dikutip dari Sastropoetro, 1986, h.86), menyebutkan bahwa partisipasi diartikan sebagai keterlibatan komuni setempat yang secara aktif dalam pengambilan keputusan/pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain (1980, h. 119 dikutip dari Ndraha, 1990), bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat serta dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Indikator Keberhasilan Partisipasi Masyarakat.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu partisipasi dalam masyarakat, diungkapkan oleh Erwiantono (2006), dapat diketahui dari beberapa indikator yang dinilai dari mulai tahap

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil. Dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tahap perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini diukur dengan melihat jumlah kehadiran warga dalam rapat maupun penyuluhan sebelum adanya kegiatan penanaman mangrove serta keaktifan dalam memberikan berbagai usulan maupun pertanyaan dalam rapat.

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun LSM. Dalam pelaksanaan ini indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan, inisiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan.

c. Tahap evaluasi

Partisipasi masyarakat yang dilihat pada tahap evaluasi meliputi pemeliharaan. Pengawasan dan pertemuan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan.

d. Tahap menikmati hasil

Keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap ini dapat dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat setelah adanya rehabilitasi seperti semakin tingginya hasil tangkapan nelayan.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan peranan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah memiliki peranan dasar yang perlu dirinci dan dilaksanakan. Perincian dan pelaksanaan dasar inilah yang disebut sebagai peranan administrative (*administrative roles*). Menurut Katz (dikutip dari Ndraha, 1990, h. 112), kemampuan administratif di bidang pembangunan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui sistem-sistem pembangunan. Sistem-sistem tersebut adalah pelaksanaan tugas (*performance*), struktur (*structure*), dan hubungan dalam lingkungan (*environmental linkages*). Dengan kata lain,

kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas yang didukung oleh struktur organisasi dan lingkungan.

3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (1984, h. 194), peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu sebagai berikut :

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku stabilisator, bahwa peran pemerintah adalah stabilisator yang menjaga kestabilan nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.

5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Menurut Kartasasmita (1996), dalam era otonomi daerah dan keterbukaan seperti saat ini, peran pemerintah di masa kini dan masa mendatang dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya adalah berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan pelopor/stimulator, yang menekankan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam koridor persatuan Indonesia. Sebagai modernisator pemerintah berkewajiban membawa perubahan-perubahan ke arah pembaharuan masyarakat. Sebagai katalisator/fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Sebagai pelopor atau stimulator, pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika memang contoh tersebut bermanfaat. Dari berbagai peranan pemerintah dalam pembangunan di atas ditetapkan satu tujuan yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Hutan Mangrove

Pada sektor pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan adalah dengan menentukan jumlah pendapatan perkapita. Namun, dalam kaitannya dengan indikator kesejahteraan, adanya rehabilitasi hutan mangrove juga memiliki andil yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah sekitar hutan mangrove. Apabila pendapatan perkapita

dipakai sebagai ukuran tingkat kesejahteraan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove dapat dilihat melalui manfaat apa sajakah yang diberikan untuk masyarakat setelah adanya program rehabilitasi. Seperti yang dikemukakan Sobari (2006, h. 69-71), dalam konteks ini ada beberapa manfaat yaitu :

- a. Manfaat langsung, yaitu manfaat yang langsung diambil dari sumber daya. Manfaat langsung tersebut berupa manfaat usaha tambak, manfaat dari hasil kayu, manfaat penangkapan hasil perikanan.
- b. Manfaat tidak langsung, yaitu nilai yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dapat berupa fisik misal hal yang mendukung nilai guna langsung misalnya hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai. Selain manfaat tidak langsung berupa fisik, hutan mangrove juga memiliki manfaat biologi sebagai *nursery ground* yaitu tempat berkembang biaknya ikan yang tentunya akan menambah produktivitas hasil tangkapan nelayan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) Peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove (2) Hasil yang Dicapai dalam Pelaksanaan Upaya-Upaya Melestarikan Hutan Mangrove (3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Lokasi dan situs penelitian adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* menurut Miles dan Hubberman (1992, h. 15). Analisis model interaktif ini melalui 4 tahap yakni

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

Temuan Peneliti

1. Partisipasi Masyarakat di Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian lingkungan di Kota Probolinggo menggunakan strategi berbasis partisipasi masyarakat (*Participation Rural Appraisal/PRA*). Penerapan PRA di Kota Probolinggo dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini didasarkan pada kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang sudah terlihat cukup mandiri dalam pelestarian lingkungan, khususnya hutan mangrove. Berbagai kalangan dan kelompok masyarakat sudah mulai banyak melakukan penanaman. Dengan adanya konsep PRA ini kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Probolinggo terhadap pelestarian hutan mangrove ini dapat dibina. Dengan konsep ini pula masyarakat dapat dilatih kemandiriannya dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat dapat dilatih untuk berinisiatif, berinovasi serta berorganisasi. Keberhasilan Kota Probolinggo dalam konsep PRA ini ditunjukkan dengan semakin antusiasnya masyarakat apabila dilibatkan dalam pelestarian lingkungan.

Dalam rehabilitasi hutan mangrove, masyarakat digerakkan untuk ikut berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan dengan cara menggerakkan seluruh elemen masyarakat mulai dari kalangan pendidikan sampai kelompok masyarakat serta dalam pelaksanaannya juga melibatkan pihak swasta yaitu Bee Jay sebagai investor di Kota Probolinggo. Dari keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat Kota Probolinggo cukup mencerminkan *Good Governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan. Strategi yang disusun oleh pemerintah Kota Probolinggo cukup mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Masyarakat Kota Probolinggo menjadi cukup aktif dalam pelestarian hutan mangrove.

Adapun strategi PRA yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membangun partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu dengan menggerakkan

berbagai elemen masyarakat (kalangan pendidikan, aparat pemerintah dan kelompok masyarakat serta pihak swasta), merintis kerja sama dengan CEI (*Caretakers of Environmental International*), melakukan sosialisasi baik secara langsung terjun ke lapangan maupun media elektronik seperti radio dengan mengadakan program talkshow pelestarian lingkungan di radio Suara Kota Probolinggo serta adanya program unggulan seperti pembentukan kelompok masyarakat.

Strategi yang kedua adalah dengan adanya pemfasilitasan pembibitan yaitu dengan mempunyai kebun bibit mangrove sendiri yang dinamakan Kebun Bibit Rakyat (KBR). KBR ini merupakan program pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian. KBR ini dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat yakni Kelompok Petani Mangrove. Strategi yang ketiga adalah adanya pembangunan jembatan oleh BLH Kota Probolinggo. Untuk pasca penanaman, BLH Kota Probolinggo juga bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dimana dinas ini membentuk suatu kelompok masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat Pengawas Pesisir (Pokmaswas). Pokmaswas ini juga dikelola oleh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Kelompok ini bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pengawasan hutan mangrove pasca penanaman oleh BLH bersama masyarakat.

Menurut hasil observasi peneliti, dengan adanya strategi yang mencakup tiga aspek yaitu membangun masyarakat, pembibitan dan pembangunan infrastruktur ini cukup efektif menggerakkan partisipasi masyarakat. Strategi ini sudah berjalan cukup baik, kawasan hutan mangrove menjadi lebih tebal dan lestari, meskipun masih ditemukan sedikit lahan yang mengalami kerusakan. Keberhasilan ini juga didukung oleh adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung. Dengan adanya regulasi ini aktivitas masyarakat Kota Probolinggo dapat dikontrol dan

pengerusakan terhadap hutan mangrove dapat diminimalisir.

Menurut Alastraire dalam Sastropetro (1986:52), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan komuni setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan/pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Kota Probolinggo melalui BLH telah berusaha untuk menggerakkan masyarakat dalam rehabilitasi. Salah satunya adalah dengan merangkul kalangan pendidikan yakni siswa-siswi baik SD hingga SMU di Kota Probolinggo rutin mengadakan rehabilitasi hutan mangrove. Dengan merangkul kalangan pendidikan juga diharapkan untuk dapat merangkul semua elemen masyarakat.

Dalam pelaksanaannya seluruh elemen masyarakat ikut serta di bawah pengawasan BLH seperti kalangan pendidikan, kelompok profesi dan agama dan instansi pemerintahan digerakkan serta. Kelompok masyarakat di bawah pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan turut berpartisipasi dengan melakukan pengawasan kelestarian mangrove yang ditanam oleh berbagai lapisan masyarakat, sedangkan Dinas Pertanian dengan Kelompok Tani menyediakan dan mengelola bibit mangrove yang nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi.

Menurut Goldsmith dan Blustain dalam Ndraha (1990) bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah ada di tengah masyarakat, partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat langsung yang diperoleh dari partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Probolinggo menjadi lebih efektif dikarenakan ada kelompok masyarakat yang ada di tengah masyarakat seperti Kelompok Tani dan Pokmaswas. Peran aktif dari masyarakat juga meningkat karena partisipasi mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat nelayan. Dengan adanya rehabilitasi hutan mangrove ini, pendapatan

nelayan semakin meningkat karena jumlah tangkapan ikan semakin banyak perharinya.

Dalam proses partisipasi yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta evaluasi. Menurut Erwiantono (2006) untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu partisipasi dalam masyarakat dapat diketahui dari beberapa indikator yang dinilai dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil.

Dalam tahap perencanaan ini diukur dengan melihat sejumlah kehadiran warga dalam rapat maupun penyuluhan sebelum adanya kegiatan penanaman mangrove serta keaktifan dalam memberikan berbagai usulan maupun pertanyaan dalam rapat. Dalam tahap perencanaan, dapat diambil contoh masyarakat dalam kelompok masyarakat pengawas pesisir misalnya. Kelompok masyarakat ini apabila ada sosialisasi kegiatan dari Dinas terkait rehabilitasi antusiasme masyarakat cukup tinggi ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang hadir dan memberikan tanggapan atas program yang disosialisasikan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi apabila diadakan sosialisasi di sekolah-sekolah oleh BLH.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun LSM. Dalam pelaksanaan ini, indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan, inisiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan. Pada tahap pelaksanaannya, juga dapat dikatakan berhasil karena sejak awal sosialisasi hingga pelaksanaan antusiasme masyarakat tetap tinggi. Terlihat dari frekuensi penanaman mangrove yang cukup intens tiap bulannya dan permintaan bibit mangrove semakin meningkat.

Pada tahap evaluasi, partisipasi masyarakat dilihat dari aspek pemeliharaan, pengawasan dan pertemuan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan sedangkan pada tahap menikmati hasil, keberhasilan masyarakat pada tahap ini dapat dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat setelah adanya rehabilitasi

seperti semakin tingginya hasil tangkapan nelayan. Pada tahap evaluasi indikatornya adalah pemeliharaan dan pengawasan. Pemeliharaan dan pengawasan hutan mangrove dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas pesisir. Kelompok ini rutin untuk melakukan pemeliharaan seperti penyemprotan hama pohon mangrove. Pengawasan dilakukan dengan menyusuri kawasan mangrove menggunakan perahu maupun berjalan kaki untuk mengontrol pertumbuhan tanaman mangrove serta melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pengerusakan hutan mangrove sedangkan pada tahap menikmati hasil, masyarakat khususnya nelayan sangat menikmati hasil rehabilitasi ini. Pasca rehabilitasi jumlah tangkapan ikan nelayan semakin meningkat hingga dua kali lipat sehingga fungsi mangrove sebagai *nursery ground* sekaligus sebagai pencegah abrasi laut tetap terjaga.

Menurut indikator di atas dapat dikatakan bahwa proses partisipasi masyarakat Kota Probolinggo terhadap rehabilitasi hutan mangrove cukup berhasil karena pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga tahap menikmati hasil masyarakat sudah berpartisipasi baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

2. Peranan BLH Kota Probolinggo dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaannya pemerintah Kota Probolinggo melalui BLH sudah menjalankan perannya dengan baik yakni sebagai modernisator, regulator, katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan sebagai pelopor. Peran sebagai modernisator diwujudkan dengan merubah pola pikir masyarakat yang masih tradisional akan kelestarian lingkungan menjadi lebih terbuka sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk melestarikan hutan mangrove. Peran sebagai regulator diwujudkan dengan menyusun berbagai regulasi terkait pelestarian lingkungan, termasuk Perda Nomor 19 Tahun 2002. Perda ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol aktivitas masyarakat yang

rentan terhadap pengerusakan lingkungan sehingga pengerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Peran sebagai katalisator/fasilitator diwujudkan dengan BLH Kota Probolinggo berusaha meminimalkan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan memaksimalkan faktor yang akan memaksimalkan program rehabilitasi, seperti terus meningkatkan partisipasi masyarakat yang mana masyarakat merupakan faktor yang rentan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. BLH memaksimalkan dengan cara membentuk masyarakat-masyarakat itu menjadi kelompok-kelompok masyarakat seperti Kelompok Petani Mangrove dan Kelompok Pengawas Pesisir. BLH juga melakukan pemfasilitasian seperti membangun infrastruktur dan pemfasilitasian bibit mangrove dan pendanaan.

Peran sebagai dinamisator dan stabilisator dilaksanakan dengan memberikan bimbingan maupun sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hutan mangrove, sedangkan untuk stabilisator adalah menstabilkan kesadaran masyarakat Kota Probolinggo agar tetap memiliki kesadaran terhadap pentingnya hutan mangrove. Untuk peran sebagai pelopor ditunjukkan BLH Kota Probolinggo dengan memberikan contoh kepada masyarakat dengan memberikan gagasan rehabilitasi dan ikut melakukan pendampingan apabila ada masyarakat yang melakukan penanaman.

Untuk hasil yang dicapai dalam pelaksanaan upaya rehabilitasi hutan mangrove ini adalah dampak terhadap masyarakat di kawasan pesisir itu sendiri, khususnya masyarakat nelayan. Dampak yang ditimbulkan meliputi 1) partisipasi masyarakat 2) penghasilan nelayan pantai dan 3) kelestarian hutan mangrove.

3. Dampak Program Rehabilitasi Hutan Mangrove

Berdasarkan observasi peneliti, dengan adanya rehabilitasi hutan mangrove ini

dirasa cukup berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Probolinggo. Masyarakat Kota Probolinggo semakin tergerak dalam setiap program pelestarian lingkungan. Ditandai dengan berhasilnya setiap pelaksanaan program rehabilitasi. Juga ditandai dengan banyak permintaan bibit mangrove oleh masyarakat karena mereka berinisiatif menanam mangrove atas nama kelompok mereka. Semula BLH yang berusaha keras menggerakkan masyarakat, akhirnya masyarakat pun memiliki keinginan untuk menanam sendiri tanpa harus melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal ini juga didukung dengan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Dengan adanya kelompok masyarakat ini maka akan mempermudah BLH untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat nelayan karena BLH memiliki mediator kelompok masyarakat. Tentunya kelompok masyarakat akan lebih mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat karena kelompok ini juga berasal dari masyarakat sekitar pesisir.

Untuk hasil yang kedua adalah dampak terhadap penghasilan nelayan pantai di pesisir Kota Probolinggo. Penghasilan nelayan pantai pada konteks ini merupakan manfaat langsung dari adanya rehabilitasi. Manfaat langsung yaitu manfaat yang langsung diambil dari sumber daya. Manfaat langsung tersebut dapat berupa manfaat hasil kayu dan manfaat hasil perikanan. Di kawasan pesisir Kota Probolinggo, perbedaan antara sebelum dilaksanakan rehabilitasi dan setelah adanya rehabilitasi. Perbedaannya terletak pada jumlah hasil tangkapan, sebelum adanya rehabilitasi hasil tangkapan nelayan pantai hanya mencapai 1 sampai 4 keranjang perharinya.

Namun setelah adanya rehabilitasi, hasil tangkapan nelayan meningkat hingga dua kali lipat dari hasil tangkapan sebelumnya. Sejauh ini, dengan melihat hasil tangkapan nelayan yang semakin meningkat, dimana peningkatan hasil tangkapan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat

peisir kota Probolinggo semakin meningkat.

Untuk hasil yang ketiga adalah dampak terhadap kelestarian lingkungan. Dampak pada kelestarian hutan mangrove ini dapat dikategorikan sebagai manfaat yang secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat akibat adanya program rehabilitasi.

Manfaat tidak langsung adalah nilai yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dapat berupa fisik yang mendukung nilai guna langsung misalnya hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai. Selain manfaat tidak langsung berupa fisik, hutan mangrove juga memiliki manfaat biologi sebagai *nursery ground* yaitu tempat berkembangbiaknya ikan yang tentunya akan menambah produktivitas hasil tangkapan nelayan.

Selain itu, manfaat dari adanya rehabilitasi juga dapat dirasakan dengan semakin tebalnya kawasan hutan mangrove di kawasan pesisir Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan yang timbul hanya 10% dari jumlah total keseluruhan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan mengingat sebelumnya hutan mangrove memiliki tingkat kerusakan mangrove yang parah. Kegiatan masyarakat juga lebih terkontrol karena pengalihfungsian lahan mulai jarang terjadi. Hanya terlihat sedikit kerusakan yang terjadi dan akan dijadikan agenda dari BLH untuk segera melakukan penanaman.

Dengan tercapainya manfaat baik langsung maupun tidak langsung ini tentunya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir khususnya yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Dimana nelayan sangat bergantung pada kondisi ekosistem laut. Selain itu, adanya rehabilitasi mangrove akan membuat fungsi kawasan mangrove sebagai tempat berkembangbiaknya ikan dan mencegah terjadinya abrasi laut akan tetap terjaga. Hal ini akan membuat kawasan pesisir Kota Probolinggo akan semakin berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat penghidupan bagi nelayan sekitar dan akan membuat kawasan pesisir Kota Probolinggo semakin terjamin kelestariannya.

Untuk faktor pendukung dan penghambat rehabilitasi hutan mangrove, dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung internal meliputi adanya kesiapan lembaga dalam pelaksanaan program yaitu dengan adanya koordinasi BLH dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan mulai tahap penanaman hingga pasca penanaman. Faktor internal yang kedua adalah adanya pembibitan melalui KBR, dan faktor yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur berupa jembatan sebagai akses masuk ke dalam hutan mangrove. Faktor pendukung eksternal yaitu antusiasme masyarakat Kota Probolinggo yang cukup tinggi dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Faktor penghambat internal yaitu masih belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yakni pembuatan jembatan yang belum selesai dan masih kurangnya jalan setapak sebagai akses masuk ke hutan mangrove yang lebih dalam. Selain itu juga dihambat oleh pendanaan yang minim untuk pembangunan jembatan, sehingga pembangunan jembatan dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah masih ada masyarakat, walaupun sebagian kecil, yang belum memiliki kesadaran terhadap pelestarian hutan mangrove.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo melalui BLH yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan Perikanan. Strategi-strategi ini meliputi membangun partisipasi masyarakat, pemfasilitasan pembibitan dan pembangunan infrastruktur
2. Dengan adanya strategi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove ini, Pemerintah Kota Probolinggo sudah menjalankan perannya dengan baik yaitu peran sebagai modernisator, regulator,

- katalisator/fasilitator, dinamisator, stabilisator dan sebagai pelopor.
3. Hasil yang dirasakan pasca rehabilitasi cukup dirasakan oleh masyarakat yaitu semakin tinggi antusiasme masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove, semakin meningkatnya hasil tangkapan nelayan pantai dan kembalinya kelestarian dan fungsi hutan mangrove.
 4. Faktor pendukung dan faktor penghambat rehabilitasi yaitu adanya koordinasi yang baik antara BLH dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan mulai dari

penanaman hingga pasca penanaman, adanya Kebun Bibit Rakyat, adanya pembangunan infrastruktur, dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi terbatasnya pembangunan infrastruktur berupa jembatan dan jalan setapak, terbatasnya pendanaan sehingga pembangunan jembatan dilakukan secara bertahap dan masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang antusias terhadap pelestarian hutan mangrove.

Daftar Pustaka

- Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2010.
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo Tahun 2011.
- Erwiantono (2006) **Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang Banyuwangi**. [Internet],3 (1), pp. 47-50. Diunduh dari : <<https://agribisnisfpumjurnal.files.wordpress.com/2012/03/jurnal-vol-3-no-1-erwin.pdf>> [Accessed 14 November 2012].
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996) **Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan**. Jakarta, CIDES.
- Miles, B. Matthew and Hubberman A. Michael. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
- Ndraha, Taliziduhu. (1990) **Pengembangan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 **Tentang Penetapan Kawasan Lindung**.
- Sastropetro, RA, Santoso. (1986) **Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Pembangunan Nasional**. Bandung, Alumni.
- Siagian, Sondang. (1983) **Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya**. Jakarta. Gunung Agung.
- Sobari, Moch. Prihatna, Luky Andrianto dan Nurdiana Azis. (2006) **Analisis Ekonomi Alternatif Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kecamatan Barru, Kabupaten Barru** [Internet], 4 (3), pp.69-71.
 Diunduh dari : <<http://journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/article/viewFile/2625/1609>> [Accessed 20 November 2012].
- Tambunan, Ridwan, R.Hamdani Harahap dan Zulkifli Lubis. (2005) **Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Asahan. Studi Kasus Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan**. [Internet], 1 (1) October, pp.56. Diunduh dari : <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678>> [Accessed 14 November 2012].
- Twintanata, Putrie. (2011) **Kerusakan Ekosistem Hutan Bakau dan Upaya Rehabilitasinya di Pesisir Kota Probolinggo**. [Internet]. Diunduh dari : < blog.ub.ac.id/putrietwint/2011 > [Accessed 25 September 2012].
- Undang – Undang No 32 Tahun 2009 **Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** [Internet].
 Diunduh dari : <http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1144:uu32tahun2009&id=21:tahun-2009&Itemid=27&start=20> [Accessed 25 September 2012].